

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi MSG (*Melanesian Spearhead Group*) adalah suatu organisasi yang anggotanya merupakan negara-negara yang memiliki latar belakang etnis dan budaya Melanesia. *Melanesian Spearhead Group* didirikan pada tahun 1988 ditandai dengan ditandatanganinya *Agreed Principles Of Co-Operation among Independent States of Melanesia* di Port Vila, Vanuatu. Akan tetapi, jika mengacu pada aturan hukum internasional, MSG resmi menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007 melalui *Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*.¹ Tujuan dibentuknya MSG adalah untuk membangun dan memasifkan hubungan dagang antar negara anggota, saling bertukar budaya baik tradisi ataupun nilai, meningkatkan solidaritas antar ras Melanesia, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan. Periode masa jabatan ketua MSG ialah dua tahun dan Sekretariat MSG berada di Port Vila, Vanuatu. Perbedaan antara full member dan *observer* adalah full member memiliki akses terhadap dokumen yang berifat *confidential*, sedangkan *observer* hanya bisa menyampaikan statement jika dipersilahkan oleh Direktur Jendral Sekretariat MSG dan tidak memiliki akses kepada dokumen yang bersifat *confidential*. Secara umum, *spirit* yang dibawa oleh MSG adalah tentang persaudaraan antar ras Melanesia. Anggota dalam MSG terbagi menjadi dua yaitu anggota tetap atau *full member* dan *observer*. Saat ini, di

¹ Kementerian Luar Negeri, "Melanesian Spearhead Group (MSG)," last modified 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg#!

MSG terdapat dua anggota berstatus *observer*, yaitu Timor Leste dan ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*).

ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*) ialah salah satu organisasi internasional yang merepresentasikan masyarakat Papua pada forum-forum internasional. Organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 6 Desember 2014 melalui deklarasi Saralana yang di Port Villa, Vanuatu. Sebagai suatu organisasi, ULMWP tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, Visi, Misi serta tujuan ULMWP adalah untuk memperjuangkan keadilan di atas tanah Papua, melawan pelanggaran HAM di Papua, dan menggalang dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara dunia dengan tujuan untuk memperjuangkan kedaulatan Papua.²

Papua ialah salah satu daerah paling timur dan terakhir yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, Papua juga termasuk salah satu wilayah jajahan yang cukup lama diduduki oleh Belanda. Hingga pada tahun 1961, pihak Indonesia mencoba untuk merebut kembali wilayah Papua dari Belanda agar kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan Indonesia ingin merebut kembali Papua karena Indonesia mengacu pada salah satu isi dari Konferensi Meja Bundar yang menyebutkan bahwa setelah Indonesia merdeka, seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda secara otomatis masuk kedalam wilayah kedaulatan Indonesia.³ Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama pecahnya operasi Trikora adalah walaupun sudah diatur dalam Konferensi Meja Bundar bahwa setelah merdeka

² Tim ULMWP, *ULMWP Persatuan Dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia Di Papua Barat*, 2015.

³ Bernarda Materay, *Nasionalisme Ganda Orang Papua* (Kompas Media Nusantara, 2012).

seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda masuk ke dalam Indonesia, pihak Belanda tetap bersikeras tidak ingin angkat kaki dari Papua.

Papua sebagai salah satu daerah yang termasuk kedalam teritori wilayah Indonesia, memiliki beberapa masalah dengan Indonesia. Diantaranya ada masalah HAM (Hak Asasi Manusia), pelurusan sejarah, masalah perjanjian New York, dan permasalahan tentang keabsahan Pepera tahun 1969. Permasalahan yang paling getol disuarakan oleh orang – orang Papua adalah permasalahan HAM dan keabsahan Pepera. Seperti yang telah kita ketahui, masalah HAM sudah menjadi rahasia umum pada ranah domestik ataupun internasional. Hak Asasi Manusia ialah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini bukan berasal dari pemberian akan tetapi semata – mata karena martabatnya sebagai seorang manusia.⁴ Isu HAM di Papua sudah disuarakan mulai dari pertama kali Papua terintegrasi ke Indonesia pada tahun 1969. Hal tersebut didasari oleh banyak orang Papua yang dibunuh selama proses integrasi Papua ke Indonesia mulai dari 1961 s/d 1969. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan surat yang dikirimkan komandan korem 172 Kolonel Blego Soemarto perihal pengamanan PEPERA kepada Bupati Merauke yang menginstruksikan untuk mengganti anggota dewan musyawarah dalam rangka untuk memenangkan PEPERA.⁵

Pada penelitin ini, peneliti menaruh fokus permasalahan HAM dalam rentang waktu tahun 2015-2020. Peneliti memilih tahun tersebut dengan alasan karena pada tahun-tahun tersebut terjadi banyak kasus pelanggaran HAM yang

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

⁵ Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Nkri," *Jurnal Politico* 2, no. 1 (2013): 1–9.

cukup mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Pada tahun 2015, terjadi kasus penembakkan terhadap dua orang siswa SMA di Mimika akibat dari orang tua kedua siswa tersebut dicurigai sebagai anggota OPM.⁶ Selain itu, pada tahun 2015, banyak terjadi kasus kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan aparat yang melanggar hak berkumpul masyarakat Papua. Selanjutnya pada tahun 2016, isu pelanggaran HAM kembali naik ke permukaan. Salah satu pemicu terjadinya kekerasan pada tahun 2016 adalah akibat dari kebijakan infrastruktur yang diambil oleh Presiden Jokowi di Papua. Selain itu, pada tahun 2016, Kapolda Papua juga secara terang-terangan mengeluarkan maklumat yang membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul.⁷ Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017, terjadi berbagai aksi penangkapan yang dilakukan aparat terhadap massa yang melakukan unjuk rasa. Setelah ditangkap, korban kemudian disiksa dengan dalih untuk menggali informasi. Akan tetapi, penyiksaan yang dilakukan sangat tidak manusiawi sehingga berdampak pada kesehatan korban tersebut.⁸ Berikutnya pada tahun 2018, terjadi kasus penembakan yang dilakukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) kepada 18 orang pekerja jalan di Kabupaten Nduga yang kemudian memicu operasi militer yang memakan korban salah tangkap serta salah tembak.⁹ Selanjutnya pada tahun 2019, terjadi kasus diskriminasi dan kriminalisasi terbesar pada tahun tersebut yaitu peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Akibat dari kejadian tersebut, gelombang

⁶ Franciscans International, *Letter For United Nations Office at Geneva*, 2015.

⁷ Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2016 Di Papua*, 2016.

⁸ International Coalition For Papua and Westpapua-Netzewrk, *Human Rights in West Papua 2017, International Coalition for Papua*, 2017.

⁹ Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2018 Di Papua*, 2018.

aksi masa yang melakukan protes pun naik secara signifikan. Akibatnya banyak terjaid kasus penangkapan dalam rentang waktu Agustus-September yang mencapai angka 1013 orang.¹⁰ Terakhir, pada tahun 2020, terjadi 51 kasus penembakkan yang menelan 32 orang korban jiwa yang diantaranya berasal dari anggota TNI/Polri, TPNPB, serta masyarakat sipil. Selain itu, juga terjadi kasus penembakkan terhadap Pendeta Jeremias Zanambani pada 19 September 2020. Menyusul kasus tersebut, kejadian serupa juga terjadi kepada dua orang pemuda Papua yang bernama Apinus Zanambani dan Luther Zanambani. Kedua pemuda tersebut ditangkap kemudian diinterogasi dan mengalami penyiksaan yang berujung kehilangan nyawa. Setelah kedua pemuda tersebut meninggal, jenazah kedua korban tersebut kemudian di bakar untuk menghilangkan jejak.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa permasalahan diatas tanah papua ini sangat penting untuk dibahas dan dikaji sebab masih minimnya penelitian tentang problem tersebut dengan berbagai alasan mulai dari isu yang dianggap sensitif, dan permasalahan ini juga dekat dengan isu disintegrasi. Selain itu, minimnya literatur serta informasi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Papua merupakan salah satu faktor utama mengapa isu ini masih diangkat hingga saat ini. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menganalisa tentang sikap negara-negara di kawasan Pasifik yang sampai saat ini masih gencar dalam menyuarakan serta menengahi permasalahan HAM di Papua. Tercatat pada tahun 2022, terjadi beberapa jenis pelanggaran HAM yang terjadi. Menurut

¹⁰ TAPOL, *West Papua 2019 Freedom Of Expression And Freedom Of Assembly Report*, 2019.

¹¹ Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Di Papua*, 2020.

catatan Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), terdapat 53 kasus pelanggaran HAM di Papua baik kekerasan maupun non kekerasan.¹² Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara objektif. Mengingat bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hak penuh yang dimiliki oleh seseorang manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.¹³

Berangkat dari hal-hal mendasar inilah yang kemudian membawa penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Upaya MSG (*Melanesian Spearhead Group*) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah yaitu, **“Bagaimana Upaya MSG (*Melanesian Spearhead Group*) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Asasi Manusia Di Papua?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan MSG untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di Papua.

¹² Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Di Papua*, 2022.

¹³ Sri Rahayu Wilujeng, “HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS” (n.d.).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Untuk membuka prespektif baru kepada mahasiswa terhadap apa yang terjadi di Papua dan kenapa masalah yang terjadi di Papua tidak kunjung selesai. Selain itu, manfaat selanjutnya adalah dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangsih pemikiran bagi Indonesia, khususnya untuk Kementerian Luar Negeri. Terlebih lagi, saat ini negara Indonesia merupakan anggota tetap dari MSG sehingga kedepannya diharapkan dapat mengambil langkah yang tidak merugikan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh M Musa Al Hasyim dengan judul **"Diplomasi Indonesia Dalam MSG (*Melanesian Spearhead Group*) Terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI Di Papua Barat Periode 2013-2016"**. Pada skripsi ini, Musa menjelaskan tentang permasalahan – permasalahan dan apa – apa saja tindakan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah MSG untuk bertindak lebih jauh dalam menggaungkan isu – isu yang ada di Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisa teori Liberalisme menurut Immanuel Kant, Konsep Diplomasi menurut Sir Ernest Satow, dan Regionalisme menurut Richard

W Mansbach. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan, yaitu Indonesia dan MSG memiliki kedekatan yang bisa dibbilang cukup dekat karena di Indonesia sendiri memiliki sekitar 11 juta orang yang ber-ras Melanesia. Berangkat dari hal tersebutlah, untuk menunjukkan itikad baik bahwa Indonesia mencintai warganya yang memiliki ras Melanesia, sehingga Indonesia mengadakan festival Melanesia.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti terdapat pada dua factor, yaitu unit analisa dan eksplanasi. Penelitian ini meneliti tentang diplomasi yang dilakukan Indonesia di dalam MSG untuk mencoba menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti terkait MSG (*Melanesian Spearhead Group*) tetapi fokus yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya lebih focus terhadap diplomasi Indonesia melalui MSG dan pada penelitian yang diteliti penulis adalah penyelesaian kasus HAM yang dilakukan oleh MSG.

Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh salah seorang putri asli Papua yaitu Dorteia Elisabeth Elanore Frankline Wabiser dengan **“Upaya MSG (*Melanesian Spearhead Group*) Dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008 – 2017)”**. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Liberlisme Institusional dari Keohane sebagai alat analisa. Pada penelitian ini, Dorteia menyimpulkan bahwa kejadian – kejadian yang terjadi di Papua merupakan akibat dari lambatnya pemerintah Indonesia

¹⁴ Al Hasyim Musa M, “DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) TERHADAP PENJAGAAN KEDAULATAN NKRI DI PAPUA BARAT PERIODE 2013-2016” (2017).

untuk menangani berbagai persoalan yang ada di Papua. Akibat dari hal tersebut, aktivis – aktivis pejuang Papua merdeka lebih memilih untuk mencari dukungan internasional.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang dilakukan adalah sikap yang diambil oleh MSG. Pada penelitian ini tidak berfokus pada isu apa yang MSG coba untuk internasionalisasi. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan, peneliti berfokus pada kasus pelanggaran HAM yang coba MSG bantu untuk diselesaikan. Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang di angkat penulis dan penelitian sebelumnya yakni penelitian penulis lebih focus pada penyelesaian kasus HAM di papua yang di lakukan oleh MSG sedangkan fokus pada penelitian sebelumnya adalah menginternasionalisasi isu Papua Barat. Persamaan yang ada adalah sama-sama menggunakan teori liberalisme institusional.

Penelitian ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Hubungan Internasional UMM yaitu Rizky Puteri Khamariyah dengan judul **“Kegagalan Advokasi Isu Internasional Papua Oleh Organisasi Papua Merdeka”**. Penelitian ini mencoba menganalisis mengapa Advokasi isu Papua di ranah internasional selalu gagal. Penelitian ini memncoba melihat kegagalan advokasi isu Papua di ranah internasional menggunakan konsep separatism dan konsep pemberontakan sebagai pisau analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah diantara semua upaya yang dilakukan oleh OPM untuk menginternasionalisasi isu Papua pada ranah internasional yang tujuan akhirnya adalah memerdekakan Papua dari

¹⁵ Dorteia Elisabeth Elanore Frankline Wabiser, *Upaya Melanesian Spearhead Group (Msg) Dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008 – 2017)*., 2019.

Indonesia, semua upaya tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan OPM adalah dengan masuk kedalam organisasi MSG (*Melanesian Spearhead Group*) untuk mencari dukungan dari negara – negara kawasan Pasifik. Upaya tersebut pun berhasil digagalkan oleh Indonesia dengan cara masuk kedalam organisasi tersebut agar bisa memantau secara langsung aktifitas di dalam organisasi tersebut.¹⁶ Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang di angkat penulis lebih berfokus pada MSG dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua sedangkan pada penelitian ini lebih kepada kegagalan advokasi internasional terhadap isu Papua dan bagaimana OPM masuk kedalam organisasi MSG untuk mencari dukungan dari negara Kawasan yang menjadi anggota MSG dan persamaan yang ada yaitu sama-sama menjadikan MSG sebagai wadah untuk menyelesaikan kasus HAM yang ada di Papua.

Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Habibie Muhammad dengan judul **“Kepentingan Vanuatu Atas Usulan Investigasi Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia”**. Penelitian ini mencoba membongkar apa yang menjadi kepentingan Vanuatu di Papua sehingga dalam beberapa kesempatan di Sidang Majelis Umum PBB seringkali menyuarakan mengenai permasalahan yang terjadi di Papua. Penelitian ini menggunakan teori *Democratic Peace* dan *Proacted Social Conflict* sebagai pisau analisa untuk melihat kepentingan Vanuatu di Papua. Hasil dari penelitian ini adalah sikap Vanuatu didasari oleh kesamaan ras antara masyarakat Vanuatu dan Papua. Selain itu, hal

¹⁶ Rizky Puteri Khamariyah, “Kegagalan Advokasi Isu Internasional Papua Oleh Organisasi Papua Merdeka,” *Universitas Muhammadiyah Malang*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

ini juga dilakukan karena Vanuatu melihat bahwa tidak ada transparansi dari pemerintah Indonesia di Papua karena sampai saat ini, tidak ada jurnalis asing yang masuk untuk meliput berbagai kejadian yang terjadi di Papua.¹⁷ Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada kepentingan Vanuatu terhadap isu HAM di Papua, sedangkan penelitian yang akan diangkat penulis adalah upaya dari MSG dalam penyelesaian kasus HAM di Papua. Persamaan yang ada yaitu sama-sama berfokus pada masalah HAM di Papua.

Penelitian kelima adalah skripsi yang ditulis oleh Reineer Sandi Yudha dengan judul “**Alasan Indonesia Membantu Proses Demokratisasi Fiji Tahun 2006**”. Penelitian ini menggunakan teori *Democracy Peace Theory* sebagai pisau analisa untuk melihat permasalahan ini. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif – kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Fiji sebagai bekas negara yang dipimpin oleh rezim militer berupaya untuk lepas dari cengkaman rezim tersebut. Sehingga Fiji meminta bantuan ke Indonesia karena melihat ada kesamaan antara Fiji dan Indonesia. Kesamaan tersebut adalah Indonesia sendiri pernah dipimpin oleh rezim otoriter pada zaman orde baru, sehingga Fiji memilih untuk meminta bantuan pada Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri melihat ini sebagai kesempatan untuk mengakomodir kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik Selatan. Hasil dari bantuan yang

¹⁷ Habibie Muhammad, “Kepentingan Vanuatu Atas Usulan Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia.,” 2017.

diberikan oleh Indonesia kepada Fiji adalah masuknya Indonesia dalam organisasi MSG (*Melanesian Spearhead Group*).¹⁸

Terkait pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni pada focus yang di angkat, dimana pada penelitian sebelumnya lebih kepada alasan Indonesia pada demokratisasi Fiji hingga membawa Indonesia bergabung pada organisasi MSG, sedangkan fokus dari penelitian penulis lebih kepada upaya MSG dalam penyelesaian kasus HAM di Papua, dan terdapat perbedaan teori yang menjadi hal pembedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang nantinya di teliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menjelaskan terkait MSG.

Penelitian keenam adalah jurnal yang ditulis oleh M Syaprin Zahidi dengan judul **“Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan alat analisa menggunakan Pendekatan Proses Organisasi oleh Graham T Allison dan *Adaptive Model Of Foreign Policy* dari Rosenau. Pada penelitian ini, Syaprin menjelaskan mulai dari sistem pemerintahan Vanuatu yang menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer, lalu mekanisme pengambilan proses pengambilan keputusan di Vanuatu dimana mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan melibatkan aktor – aktor penting di negara tersebut berupa partai – partai yang mendominasi dan beberapa partai lainnya yang kurang mendominasi. Akan tetapi keputusan Vanuatu untuk mendukung ULMWP terpengaruh oleh visi dari partai yang

¹⁸ Reineer Sandi Yudha, “Alasan Indonesia Membantu Proses Demokratisasi Fiji Tahun 2006” (2019).

mendominasi yaitu Vanua'aku Pati-VP yang lebih mengarah ke hal – hal yang berbau budaya dan sejarah Melanesia. Berangkat dari kesamaan ras tersebutlah Vanuatu memilih untuk mendukung ULMWP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sikap Vanuatu yang cenderung mendukung ULMWP berdasar pada dominasi partai besar yaitu Vanu'aku Pativp yang memiliki posisi penting pada percaturan politik Vanuatu sendiri. Hal ini didasari oleh partai yang mendominasi tersebut memiliki visi yaitu untuk mendukung gerakan *Melanesian Way* yang arahnya adalah mendukung ULMWP.¹⁹ Hal yang menjadi pembeda pada penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian yang akan di teliti oleh penulis menggunakan teori liberalis institusionalis, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan proses organisasi oleh Graham T Allison.

Penelitian ketujuh adalah jurnal yang juga ditulis M Syaprin Zahidi dan Musfiroh dengan judul “*The Melanesian Spearhead Group In Terms Of Indonesia's Interest*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis dan menggunakan alat analisa Model Adaptif Luar Negeri oleh Brown dan Kristen. Penelitian ini mendapati temuan bahwa gerakan separatis di Indonesia khususnya Papua menggunakan dua cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Yang pertama dengan cara lunak yaitu dengan membujuk masyarakat Papua untuk membenci pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan diskriminatif terhadap orang Papua dengan menggunakan Papua sebagai daerah

¹⁹ M Syaprin Zahidi, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 3, January 2020.

operasi militer dan mereka juga mengatakan kepada orang Papua bahwa pemerintah Indonesia tidak sopan dengan memberikan kepemilikan Freeport pada orang asing sehingga tidak menguntungkan bagi orang Papua. Sedangkan cara kasar yang mereka lakukan adalah dengan cara melakukan berbagai agresi bersenjata.²⁰

Penelitian kedelapan adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh M. Syaprin Zahidi dan Hafid Adim Pradana dengan judul **“Pola Relasi Hukum Internasional Dan Negara Pada Perundingan Masalah Papua Barat Tahun 1950- 1962”**. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan alat analisa yang digunakan adalah Prespektif Realisme Dalam Hukum Internasional dari Starke. Penelitian ini mencoba untuk melihat kegunaan dari Hukum Internasional dalam berbagai perundingan yang dilakukan Indonesia untuk mencoba mengembalikan Papua dari pangkuan Belanda kembali ke Indonesia. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa ternyata hukum internasional sangat berguna untuk perundingan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakberdayaan Belanda ketika ditekan oleh dunia Internasional karena tidak menaati apa – apa saja yang sudah disepakati bersama pada Konferensi Meja Bundar. Sehingga pada akhirnya, pada Perjanjian New York, Belanda akhirnya menyerah kepada Indonesia dan akhirnya Belanda mengembalikan Papua ke pangkuan Indonesia.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori realisme dalam

²⁰ M. Syaprin Zahidi – MA, “The Melanesian Spearhead Group in Terms of Indonesia’s Interest,” *Przegląd Politologiczny*, no. 2 (June 26, 2018): 165–172.

²¹ M Syaprin Zahidi and Hafid Adim Pradana, “Pola Relasi Hukum Internasional Dan Negara Pada Perundingan Masalah Papua Barat Tahun 1950- 1962,” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 5, no. 1 (2020): 81.

hukum internasional, sedangkan teori yang digunakan penulis adalah liberalisme institusional yang lebih menjelaskan pada masalah keamanan di tingkat Kawasan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait masalah yang ada di Papua.

Penelitian kesembilan adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh M Yusuf Samad dan Diah Ayu Permatasari yang berjudul “**Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam MSG (Melanesian Spearhead Group)**”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyandingkan antara studi literatur dan data – data yang diambil dari Twitter dan salah satu situs web. Penelitian ini mendapati hasil ULMWP melalui *Free West Papua Campaign* berupaya untuk mencari dukungan untuk mendorong ULMWP agar menjadi anggota tetap di organisasi sub-regional di kawasan Pasifik yaitu MSG (*Melanesian Spearhead Group*).²²

Penelitian kesepuluh adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Stephanie Lawson yang berjudul “**West Papua, Indonesia and The Melanesian Spearhead Group : Competing Logics In Regional And International Politics**”. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kontestasi antara Papua, Indonesia dan MSG. Dimana Indonesia sebagai suatu negara berdaulat yang ingin mempertahankan wilayahnya yaitu Papua. Sementara disisi lain, MSG sebagai organisasi sub-regional Pasifik, menerima ULMWP sebagai salah satu anggota *observer* dari

²² M. Yusuf Samad and Diah Ayu Permatasari, “Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 401–412.

organisasi tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat tentu saja tidak ingin melepaskan wilayahnya begitu saja, sehingga langkah yang diambil oleh Indonesia adalah masuk sebagai anggota tetap dari MSG agar bisa memantau secara langsung aktifitas ULMWP di forum MSG.²³

Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah focus terhadap MSG dimana penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap MSG, sedangkan focus pada penelitian ini adalah upaya MSG dalam menyelesaikan kasus HAM di Papua. Persamaan yang ada adalah sama-sama meneliti terkait.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul & Nama Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil
1	Skripsi : Diplomasi Indonesia Dalam MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>) Terhadap Penjagaan	Teori : Liberalisme Konsep : Diplomasi dan Regionalisme	- Penelitian ini menjelaskan apa – apa saja upaya yang dilakukan Indoensia dalam menjaga kedaulatan NKRI di Papua Barat. Salah satu upaya yang

²³ Stephanie Lawson, "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing Logics in Regional and International Politics," *Australian Journal of International Affairs* 70, no. 5 (September 2, 2016): 506–524.

	<p>Kedaulatan Nkri Di Papua Barat Periode 2013- 2016</p> <p>Oleh : M Musa Al Hasyim</p>		<p>dilakukan Indonesia adalah dengan bergabung di dalam organisasai sub- regional yaitu MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>) untuk mengawasi pergerakan setiap anggota MSG dari dalam. Hal ini dilakukan karena salah satu anggota <i>observer</i> dari MSG adalah ULMWP yang merupakan salah satu organisasi turunan dari gerakan Papua merdeka.</p> <p>- Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu MSG (<i>Melanesian</i></p>
--	---	--	---

			<p><i>Spearhead Group</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaannya adalah penelitian ini lebih banyak membahas tentang upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI.
2	<p>Skripsi : Upaya MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>) Dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008 – 2017)</p> <p>Oleh : Dorthea Elisabeth Frankline Elanore Wabiser</p>	<p>Teori : Liberalisme Institusional Konsep : Collective Security</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya – upaya yang dilakukan oleh MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>) dalam melakukan internasionalisasi isu di Papua Barat agar tercapainya perdamaian di daerah tersebut. - Persamaan penelirian ini terletak pada

			<p>organisasi yang diteliti yaitu MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>).</p> <p>- Perbedaannya adalah fokus penelitian ini pada internasionalisasi isu Papua Barat secara umum.</p>
3	<p>Skripsi : Teori Kegagalan Advokasi Isu Internasional Papua Oleh Organisasi Papua Merdeka Oleh : Rizky Puteri Khamariyah</p>	<p>Teori Liberalisme : Konsep Separatisme dan Pemberontak</p>	<p>- Penelitian ini membahas tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab OPM ingin melepaskan diri dari Indonesia serta apa saja yang sudah dilakukan OPM untuk melepaskan diri dari Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang.</p>

			<p>apa saja yang menjadi faktor kegagalan advokasi isu Papua yang dibawa ke ranah internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitian ini ada pada tempat yang diteliti. - Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada isu Papua secara umum yang dibawa ke ranah internasional.
4	<p>Skripsi : Kepentingan Vanuatu Atas Usulan Investigasi Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia</p>	<p>Teori : <i>Democratic Peace</i> dan <i>Protacted Social Conflict</i> Konsep : Kepentingan Nasional dan HAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini membahas tentang konflik – konflik yang terjadi di Papua Barat serta Vanuatu sebagai negara yang menyuarakan isu tersebut di ranah internasional karena

	Oleh : Habibie Muhammad		<p>kepentingan tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitian ini adalah sama – sama membahas soal HAM serta Vanuatu sebagai salah satu negara di kawasan Pasifik yang vokal dalam menyuarakan konflik Papua di ranah internasional. - Perbedaannya adalah penelitian ini spesifik membahas mengenai sikap Vanuatu atas pelanggaran HAM di Papua.
5	Skripsi : Alasan Indonesia Membantu Proses Demokratisasi Fiji Tahun 2006	<p>Teori : <i>Democracy</i> <i>Peace Theory</i></p> <p>Konsep : Demokratisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini membahas tentang kondisi negara Fiji yang mengalami kekacauan pasca kudeta tahun 2006.

	Oleh : Reineer Sandi Yudha		<p>Selain itu penelitian ini juga membahas faktor – faktor mengapa Indonesia membantu demokratisasi Fiji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitian ini adalah sama – sama membahas negara anggota MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>) beserta dinamika di dalam organisasi tersebut. - Perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus pada kepentingan Indonesia untuk membantu Fiji dalam proses demokratisasi.
6	Jurnal : Analisis	Teori	: - Penelitian ini

	<p>Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia</p> <p>Oleh : M Syaprin Zahidi</p>	<p>Kebijakan Luar Negeri (Rosenau) Konsep : Diplomasi</p>	<p>menjelaskan kenapa kebijakan luar negeri Vanuatu yang cenderung mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Hal ini ditinjau dari ideologi yang dianut oleh Vanuatu yang mengedepankan kesatuan Ras Melanesian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitian ini ada pada substansi yang diteliti. Karena hadirnya ULMWP merupakan hasil dari berbagai pelanggaran yang dilakukan di tanah Papua. - Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya menganalisa
--	--	---	--

			kebijakan luar negeri Vanuatu.
7	Jurnal : The Melanesian Spearhead Group In Terms Of Indonesia's Interest	Teori : Kebijakan Luar Negeri (Kristen Brown) Konsep : Diplomasi	- Penelitian ini menyebutkan bahwa masuknya Indonesia kedalam Melanesian Spearhead Group untuk menekan pergerakan organisasi pembebasan Papua seperti ULMWP bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan ditolaknya ULMWP untuk menjadi anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Group. - Persamaan penelitian ini terdapat pada organisasi yang diteliti yaitu MSG

	Oleh : M Syaprin Zahidi		(<i>Melanesian Spearhead Group</i>) - Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai kepentingan Indonesia untuk masuk ke dalam MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>)
8	Jurnal : Pola Relasi Hukum Internasional Dan Negara Pada Perundingan Masalah Papua Barat Tahun 1950 – 1962 Oleh : M Syaprin Zahidi dan Hafid Adim Pradana	Teori Realisme (Starke) Konsep : Diplomasi	- Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan suatu negara adalah dengan menggunakan hukum internasional. - Persamaan penelitian ini ada pada tempat yang di teliti. - Perbedaannya adalah

			fokus penelitian ini ada pada sejarah integrase Papua masuk kedalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
9	Jurnal : Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam MSG (Melanesian Spearhead	Teori : Kebijakan Luar Negeri Konsep : <i>Campaign</i>	- Penelitain ini membahas mengenai perilaku MSG sebagai organisasi subregional yang menerima ULMWP sebagai anggota <i>observer</i> yang secara masif melakukan kampanye Papua merdeka. - Persamaan penelitian ini ada pada organisasi yang diteliti yaitu <i>Melanesian Spearhead Group</i> . - Perbedaannya adalah

	Group) Oleh : M Yusuf Samad dan Diah Ayu Permatasari		penelitian ini berfokus pada perilaku dari <i>Melanesian Spearhead Group</i> yang menerima ULMWP sebagai anggota observer.
10	Jurnal : West Papua, Indonesia And The Melanesian Spearhead Group: Competing Logics In Regional And International Politics Oleh : Stephanie Lawson	Teori : Liberalisme Konsep : Diplomasi	- Penelitian ini membahas tentang dinamika pertarungan politik yang terjadi antara Papua, Indonesia, dan <i>Melanesian Spearhead Group</i> . Pembahasan pada penelitian ini dimulai dengan organisasi regional di kawasan Pasifik, semangat anti kolonialisme yang dianut oleh negara – negara Pasifik,

			<p>ideologi <i>Melanesian Way</i> yang dianut oleh negara – negara Pasifik, dan hubungan antara MSG – Papua.</p> <p>- Persamaan penelitian ini ada pada objek yang diteliti serta dinamika antara Indonesia, MSG, dan Papua.</p> <p>- Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak membahas apa – apa saja permasalahan yang terjadi di Papua.</p>
--	--	--	---

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Liberalisme Institusional

Teori Liberalisme Institusional ialah salah satu teori yang muncul pasca perang dunia pertama. Realisasi dari teori ini dibuktikan dengan berdirinya LBB sebagai salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk

menciptakan perdamaian dunia. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Robert Keohane yang berpendapat bahwa institusi-institusi internasional diciptakan sebagai respon terhadap berbagai kepentingan negara serta karakter yang dibentuk sesuai kemampuan yang ada. Selain itu, Keohane juga berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa institusi internasional juga memiliki sedikit pengaruh terhadap perilaku negara-negara anggota dalam konteks untuk menjaga kestabilan.²⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Liberalisme Institusional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dalam menganalisis Upaya MSG (*Melanesian Spearhead Group*) dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Menurut Keohane dalam teori Liberalisme Institusional, institusi internasional memiliki peran sebagai penyedia informasi sehingga berpeluang untuk bernegosiasi, menjadi wadah untuk dapat meningkatkan kemampuan suatu pemerintahan dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati agar negara lain tunduk serta patuh kepada suatu perjanjian yang telah disepakati.²⁵ Selain itu, penganut paham institusionalis juga menganggap bahwa, walaupun negara lebih condong anarki, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kerja sama tetap bisa dilakukan melalui perantara rezim internasional.²⁶

²⁴ Robert O Keohane and Lisa L Martin, "The Promise Of Institutional Theory," *International Security* 20, no. 1 (1995): 39–51.

²⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

²⁶ Mohamad Mohamad Rosyidin, "Teori Hubungan Internasional : Dari Prespektif Klasik Sampai Non-Barat" (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 53.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan Liberalisme Institusional. Penelitian deskriptif merupakan metode yang apabila peneliti ingin mencoba untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kejadian yang pernah terjadi.²⁷ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk melihat serta menganalisis mengapa serta apa saja upaya yang dilakukan *Melanesan Spearhead Group* dalam membantu menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.

1.6.2 Metode Analisis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa kualitatif dengan memilih dan menyusun data yang diperoleh dari studi literatur untuk membentuk suatu pola yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya diolah dan mengambil data yang dapat mendukung permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diharapkan dapat sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menaruh fokus pada upaya-upaya yang dilakukan *Melanesian Spearhead Group* dalam membantu proses penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

²⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).

1.6.3.1 Batasan Materi

Penelitian ini menggunakan Batasan materi pada upaya apa yang dilakukan MSG (*Melanesian Spearhead Group*) dalam membantu Papua menyuarkan isu HAM yang terjadi di Papua.

1.6.3.2 Batasan Waktu

Penelitian ini menggunakan Batasan waktu mulai dari tahun 2015 – 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi gejolak yang terjadi di Papua yang dikibatkan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Selain itu, ULMWP resmi menjadi anggota MSG dengan status *Observer* pada tahun 2015 sehingga dinamika politik dan diplomasi yang dilakukan antara ULMWP dan Indonesia di MSG baru dimulai sejak tahun tersebut.

1.6.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan yang dimaksud berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan website yang tentunya kredibel dan masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait untuk menambah wawasan peneliti melakukan penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Melanesian Spearhead Group sebagai salah satu organisasi yang berlandaskan semangat *Melanesian Brotherhood* memiliki beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang ada di Papua. Sebagai suatu organisasi, MSG juga berupaya untuk menyelesaikan konflik hak asasi manusia di Papua dengan menggunakan cara-cara diplomatis baik melalui internal organisasi ataupun eksternal. Diantara upaya internal MSG dalam upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Papua adalah dengan menerima Indonesia dan ULMWP yang merupakan representasi dari Papua dalam keanggotaan organisasi. Selain itu, Adapun upaya eksternal yang dilakukan oleh MSG yaitu dengan beberapa kali mencoba untuk mengangkat permasalahan Papua dalam forum PIF, UNGA, dan lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB	Bagian	Sub Bagian
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang
		1.2 Rumusan Masalah
		1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian
		1.4 Penelitian Terdahulu
		1.5 Kerangka Teori

		1.6 Metode Penelitian
		1.7 Hipotesis
		1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Papua	2.1 Sejarah Pelanggaran HAM Di Papua 2.2 Jenis Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Papua
BAB III	Upaya Internal dan Eksternal MSG (<i>Melanesian Spearhead Group</i>)	3.1 Analisis Langkah MSG Dengan Menerima ULMWP Sebagai Anggota (<i>Melanesian Brotherhood</i>) 3.2 Analisis Langkah MSG Dengan Menerima Indonesia Sebagai Anggota 3.3 Analisis Kebijakan MSG Dalam Menyikapi Permasalahan Papua 3.4 Bentuk Dukungan MSG Kepada Papua 3.5 Internasionalisasi Isu HAM Papua Dalam Forum-Forum Internasional
BAB IV	Penutup	4.1 Kesimpulan

		4.2 Saran Penelitian Lanjutan
--	--	-------------------------------

